



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 709 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 perlu diterjemahkan lebih rinci ke dalam rencana aksi tahunan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 709 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
SS. 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel														
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	90.56%	90.56%	Penyusunan Kebutuhan Jabatan pada Peta Jabatan berdasarkan Anjab dan ABK dan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional dari	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Jabatan pada 32 Perangkat Daerah	5	20	5	2	32	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				masing-masing Instansi Pembina										
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	n/a	-	Tersedianya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bagi pegawai ASN	Dokumen	Jumlah kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bekerja pegawai	0	0	0	0	0	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
				Melaksanakan internalisasi kebijakan sistem kerja baru	Jumlah	Jumlah SKPD yang dilakukan internalisasi	0	0	0	0	0			
				Melaksanakan penyesuaian proses bisnis dengan sistem kerja baru	Dokumen	Jumlah Proses Bisnis yang disesuaikan	0	0	0	0	0			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan sistem kerja baru	Dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi sistem kerja baru	0	0	0	0	0			
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.31 (Baik)	3,4 (Baik)	Pembuatan SK Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen	SK Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	1	1	0	2	Rp -	Diskominfo tik	Seluruh SKPD
				Sosialisasi tentang Arsitektur SPBE	Kegiatan	Jumlah Terlaksanaan Kegiatan Sosialisasi tentang Arsitektur SPBE	0	0	0	1	1	Rp 19,600,000	Diskominfo tik	Seluruh SKPD
				Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Kegiatan	Terlaksanaan Kegiatan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	Rp 11,000,000	Diskominfo tik	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	Rp 5,460,000		
				Sosialisasi tentang Peta Rencana SPBE	Kegiatan	Sosialisasi tentang Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	0	0	Rp 19,600,000		
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	93	Pengembangan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning	Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	3	0	0	0	3	Rp 56,737,600	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
				Melakukan asistensi untuk Peningkatan konsistensi RPJPD-RPJMD-Renstra	Kegiatan	Jumlah Berita Acara hasil asistensi yang di tindak lanjuti	0	0	0	32	32	Rp 24,750,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
							PD-RKPD dan Renja PD							
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan	Jumlah usulan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir SKPD pengampu	0	100	0	0	100	Rp 313,580,000			
			Melaksanakan Bimtek perencanaan kepada SDM yang menangani perencanaan di SKPD	Kegiatan	Jumlah ASN di bidang perencanaan ikut diklat	0	63	0	0	63	Rp 252,014,900			
	Nilai SAKIP	71.20 (BB)	75 (BB)	Membentuk Tim Uji kualitas/ Verifikasi perencanaan kinerja	SK	Tersusunnya SK terkait Tim uji / verifikasi	0	0	1	0	1	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
				SKPD											
				Reviu dan Asistensi Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen yang di revisi sesuai hasil asistensi	0	0	0	32	32	Rp 24,750,000			
				Melaksanakan Bimtek perencanaan kepada SDM yang menanganinya perencanaan di SKPD	Orang	Jumlah ASN di bidang perencanaan ikut diklat	0	63	0	0	63	Rp 252,014,900			
				Melaksanakan pengembangan sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja	Dokumen	Penyusunan proses bisnis	0	0	1	0	1	Rp -	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	
					Kegiatan	Pengembangan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi	0	0	0	1	1				

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terintegrasi	Kegiatan	Sosialisasi dan implementasi sistem	0	0	0	0	0			
				Melaksanakan peningkatan kompetensi penyusunan laporan kinerja	Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	0	0	0	1	1	Rp 50,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
				Melaksanakan Peningkatan kompetensi evaluator internal	Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi evaluator	0	0	0	1	1	Rp 100,000,000	Inspektorat	Inspektora t
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi pelayanan publik digital	0	1	Menyediakan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi antar dinas teknis	Program	Ketersediaan program aplikasi yang memudahkan proses pelayanan publik	0	0	1	0	1	Rp 17,000,000	Diskominfo tik	Seluruh SKPD
												Rp 60,500,000	DPMP TSP	Diskominfo tik

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	2	3	Melakukan pendampingan ke SKPD yang diusulkan sebagai SKPD menuju WBK/WB BM	Laporan	Laporan Pendampingan ZI	0	0	1	0	1	Rp 40,000,000	Inspektorat	Seluruh SKPD
					SK	SK Tim Pendampingan ZI	1	0	0	0	1	Rp -	Inspektorat	SKPD Terkait
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	3	3	Membangun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua SKPD	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP, Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	0	0	2	0	2	Rp 56,511,000	Inspektorat	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					SK	SK Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
					SE	Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan	0	0	0	0	0	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Laporan SP4N Lapor	90%	100%	Sosialisasi di SP4N-LAPOR kelurahan dan sekolah, Bamara (Badapatan Menyambungkan Silaturahmi) ke kampus dan Bimtek Bagi Admin Lapor SKPD	Program	Jumlah program kegiatan yang diintegrasikan	3	2	1	5	11	Rp 840,345,760	Diskominfotik	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas Eksternal oleh KPK	82,86	82,92	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	Laporan	Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	0	1	1	0	2	Rp 19,500,000	Inspektorat	Seluruh SKPD
	Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK	79,84	79,93											
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	66	Pembentukan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Jumlah	Jumlah Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	1	-	1	Rp1,131,000,000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
				Identifikasi Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Jumlah	Jumlah Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	Perda 1 Perwali	-	Perda 1 Perwali			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	60	Pengharmonisan Rancangan Produk Hukum Daerah dengan Instansi yang Berwenang	Jumlah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan Instansi yang Berwenang	1	2	2	2	7	Rp -	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
				Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter) yang berkualitas	Jumlah	Jumlah Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter) yang ditugaskan mengikuti pelatihan/bimtek	-	-	1	1	2			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Telah Selesai Dievaluasi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Per da 1 Per wal i 1	Per da 1 Per wal i 1	Per da 1 Per wal i 1	Per da 1 Per wal i 1	Per da 4 Per wal i 4			
				Melaksanakan Pengelolaan JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Persen	Persentase terkelolanya JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawas Kearsipan	48.88	55	Melaksanakan Alih Media dari Konvensional ke	Berkas	Jumlah Data yang telah dialihkan ke digital	100	0	0	0	100	Rp -	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
				Digital											
				Kebijakan kearsipan	Jumlah	Jumlah kebijakan kearsipan yang telah dikeluarkan	3	3	0	0	6	Rp 894,767,960			
				Akuisisi arsip SKPD yang sudah dibubarkan atau di merger / dihapuskan	Jumlah	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	0	0	0	1000	1000	Rp 116,533,800			
				Pendampingan penataan arsip inaktif	Persen	Persentase pelayanan arsip inaktif kepada SKPD	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	Rp -			
				Peningkatan kompetensi SDM arsiparis	Orang	Jumlah arsiparis yang ditingkatkan	6	0	0	0	6	Rp -			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
						kompetensinya									
				Melaksanakan akan bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	Unit Kerja	Jumlah SKPD yang telah mengikuti bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	0	0	35	0	35	Rp -			
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.33 (Cukup)	2.6 (Baik)	Pembuatan SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas	Dokumen	SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas Kegiatan	1	0	0	0	1	Rp -	Diskominformatik	Seluruh SKPD	

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin									
				Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	2	0	4	Rp 27,800,000			
				Bimtek Satu Data dan Statistik Sektoral	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Bimtek Satu Data dan Statistik	1	0	0	1	2	Rp 25,750,000			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana		
						Sektoral										
					Pembuatan Dokumen Data	Dokumen	Jumlah Pembuatan Dokumen Data	0	0	2	0	2				Rp 47,978,500
					Terselenggaranya forum satu data	Kegiatan	Forum satu data tingkat daerah	0	0	0	1	1				Rp 58,200,000
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68.7	72	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	Kali	Jumlah sosialisasi PBJ	1	1	1	0	3	Rp 30,911,400	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD		
				Melakukan Pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Orang	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih	0	4	10	7	21	Rp 133,000,000				

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	0	0	0	9	9	Rp 9,970,000		
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam penyusunan laporan Keuangan	Dokumen	Laporan Keuangan	3	3	3	3	12	Rp 974,699,200	BPKPAD	Seluruh SKPD
				Pengimplementasian Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan	Aplikasi	Jumlah modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penatausahaan keuangan	1	0	0	0	1	Rp 12,405,000		
				Pengimplementasian aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan dalam penyusunan	Aplikasi	Modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan laporan	1	0	0	0	1	Rp 329,439,600		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
							an laporan keuangan		keuangan					
	Persentase Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	60%	75%	Melaksanakan Sosialisasi Akuntansi Keuangan Daerah kepada PPK SKPD sehingga memiliki pengetahuan dalam pemilihan kode belanja pada saat proses awal pengadaan barang dan jasa serta memiliki pengetahuan dalam verifikasi pertanggung	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0	1	0	1	2	Rp 645,259,800	BPKPAD	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
				ngiawaban pendapatan dan belanja											
				Rekonsiliasi data Laporan Keuangan SKPD	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	4	Rp 329,439,400			
				Melaksanakan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan	Jumlah Laporan	1	1	1	1	4	Rp 60,000,000	Inspektorat	Inspektora t	
SS. 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional															
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	-	175	Peningkatan kompetensi JF melalui Diklat Fungsional maupun Teknis	Persen	Persentase JF yang mengikuti pelatihan	5%	10%	5%	5%	25%	Rp 721,039,000	BKD, Diklat	Seluruh SKPD	

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Manajemen Talenta ASN				Pelaksanaan asesmen potensi/kompetensi PNS dalam rangka penyusunan profil ASN	Orang	Jumlah PNS yang mengikuti asesmen potensi/kompetensi	813	47	0	0	860	Rp 966,040,000		
				Membangun sistem informasi yang memuat profil ASN dan Talent Pool (9 kotak talenta)	Aplikasi / program	Sistem Informasi Manajemen Talenta	0	0	0	1	1	Rp -		
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN				Melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi	3	5	4	3	15	Rp 200,000,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Orang	Jumlah ASN tugas belajar	0	25	20	0	45	Rp 743,296,800		
				Melaksanakan pengelolaan Diklat	Persen	Persentase peserta Diklat yang lulus	10 %	40 %	35 %	15 %	100 %	Rp4,673,366,200		
				Melaksanakan penyusunan dan asistensi penilaian kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen penyusunan dan asistensi penilaian kinerja ASN	0	0	0	1	1	Rp 165,000,000		
				Melaksanakan Rapat MPPHDP, monitoring dan sosialisasi	Kali	Jumlah monitoring, jumlah Rapat MPPHDP, jumlah sosialisasi	3	6	6	4	19	Rp -		
				Melaksanakan mediasi proses izin perceraian pegawai	Kali	Jumlah penyelesaian izin cerai	1	1	1	2	5	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Sistem Merit				Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan ASN	Kali	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang sudah ditetapkan PPK	1	1	0	0	2	Rp 8,820,000		
				Melaksanakan Pengadaan ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	0	0	1	1	2	Rp 689,410,000		
				Melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Kali	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	0	0	1	0	1	Rp 27,888,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan Pengembangan Karier ASN	Dokumen / Perwali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT, JA dan JF	0	0	0	1	1	Rp -		
				Menyusun profil pegawai	Orang	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi	81	200	350	281	912	Rp -		
				Menyusun rencana suksesi berdasarkan pola karier	Kali	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan	0	0	0	1	1	Rp -		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
						n pola karier instansi									
				Menganalisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk JPT dan JA	Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	0	1	0	1	2	Rp -			
				Menganalisa kesenjangan kinerja	Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	0	0	0	1	1	Rp -			
				Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN tahun 2023-2027 (rencana 5 tahunan)	Dokumen	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas	0	0	0	1	1	Rp -			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
						ASN									
				Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk memenuhi kewajiban 20 JP per tahun	Kali	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat tahunan dalam upaya pemenuhan kewajiban 20 jp per tahun	0	0	1	0	1	Rp -			
				Melaksanakan pelatihan coaching dan mentoring bagi pejabat Administrator, Pengawas, JFT dan Pelaksana senior	Kali	Jumlah pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	0	0	1	0	1	Rp -			
				Melaksanakan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah	Kali	Jumlah pelaksanaan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan	1	0	1	0	2	Rp 933,590,000			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
				h Kota Banjarmasin		Pemerintah Kota Banjarmasin									
				Melaksanakan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi secara terbuka dan kompetitif	Kali	Jumlah pelaksanaan pelantikan dalam rangka pengisian JPT, Jabatan Administrasi	1	1	2	2	6	Rp 933,590,000			
				Menyusun kontrak kinerja untuk seluruh pegawai	Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyusunan kinerja pegawai	1	2	2	1	6	Rp 165,000,000			
				Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya	Kali	Jumlah pelaksanaan kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya	1	1	1	1	4	Rp -			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana		
							kontrak kinerja		kontrak kinerja							
				Menyusun Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Kali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	1	0	0	0	1	Rp 165,000,000				
				Melaksanakan penegakan disiplin ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan disiplin ASN	3	3	3	3	12	Rp -				
				Melaksanakan tes bebas narkoba untuk ASN	Kali	Jumlah pelaksanaan tes bebas narkoba untuk ASN	0	3	2	0	5	Rp -				
				Melaksanakan pengelolaan data terkait pelanggaran	Kali	Ketersediaan data yang mutakhir terkait pelanggaran	1	1	1	1	4	Rp -				

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai		disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai							
	Menyediakan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi		Ketersediaan aplikasi untuk pelayanan kepegawaian (pengajuan pangkat, pensiun, cuti, gaji berkala, presensi online, tambahan penghasilan pegawai, SLKS, dll)	Kali	1	1	1	1	4	Rp 120,000,000				

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan pembangunan sistem informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan kepegawaian	Kali	Ketersediaan aplikasi SIMPEG berbasis online yang dibangun secara bertahap untuk dapat memberikan pelayanan kepegawaian	1	1	1	1	4	Rp 250,000,000		
				Menyediakan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	Kali	Ketersediaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1	1	1	1	4	Rp 250,000,000		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	62	75	Melaksanakan internalisasi <i>Core Values</i> ASN Berakhlak	Persen	Persentase Unit kerja yang mempublikasikan <i>core values</i> ASN	0	0	0	100 %	100 %	Rp 20,000,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4.52	4.75	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik	0	0	0	0	0	Rp 199,254,800	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	0	1	1	1	3			
				Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik	Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik	0	0	0	0	0			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	69.63	86.92	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD	0	7	0	0	7	Rp 199,254,800	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
	Melaksanakan <i>coaching clinic handling complaint</i> bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD	Kali	Jumlah <i>coaching clinic handling complaint</i> bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD	0	2	0	0	2						
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan	0	7	0	0	7						

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan akan <i>Workshop</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD	Kali	Jumlah <i>Workshop</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD	0	0	0	2	2			
				Melaksanakan akan kegiatan forum konsultasi publik (<i>public hearing</i>) standar pelayanan	Kali	Jumlah kegiatan forum konsultasi publik (<i>public hearing</i>) standar pelayanan	0	2	0	0	2			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.64	89	Melaksanakan akan Rapat Koordinasi kinerja SKM	Kali	Melaksanakan akan Rapat Koordinasi kinerja SKM	2	0	0	1	3	Rp 84,068,000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
Melaksanakan akan monitoring dan evaluasi kinerja SKM				Kali	Melaksanakan akan monitoring dan evaluasi kinerja SKM	0	1	0	1	2				

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
					Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM	Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM	0	0	0	0		0	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 709 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
1. Pengentasan Kemiskinan																
Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Menurunkan kawasan kumuh di kantong-kantong kemiskinan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	20%	20%	Menurunkan rumah tidak layak huni	Unit	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	0	0	0	38	38	Terkait	Rp 95,000,000	Dinso s	DPRKP

				Kemudahan warga miskin untuk mendapat akses air bersih dan tarif yang terjangkau	Rumah	Jumlah rumah warga miskin yang mendapat akses air bersih	6774 4	671 56	665 68	659 81	2674 49	Terkait	Rp -	DPUP R	PT. Air Minum Bandarmasih
Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan	4.74	4.35	Membuat MoU dengan lembaga sosial berbadan hukum untuk bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan	MoU	Jumlah MoU yang disepakati bersama	1	0	0	0	1	Terkait	Rp -	Bag. Kesra	Seluruh SKPD
				Menerbitkan SE Wali Kota tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada instansi-instansi diluar Pemerintah Kota Banjarmasin	SE	Jumlah SE yang diterbitkan	1	0	0	0	1	Terkait	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh instansi terkait

					Menerbitkan instruksi Wali Kota tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk internal Pemerintah Kota Banjarmasin	Instruksi	Jumlah surat instruksi Wali Kota yang diterbitkan	1	0	0	0	1	Tidak Terkait	Rp -	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
Rendahnya kualitas dan keterpaduan database	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang terpadu	1 data terpadu by name by address by NIK	100%	100%	Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran	Persen	% data penduduk miskin yang telah dimutakhirkan	100%	0	0	0	100%	Terkait	Rp 338,479,480	Dinas Sosial	SKPD Terkait
					Melakukan profiling penduduk miskin dengan memanfaatkan data dari K/L teknis	Persen	% penduduk miskin yang di-profiling	0	0	0	100%	100%	Terkait	Rp 47,880,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
					Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran	Persen	% data sasaran yang telah dilakukan verifikasi dan validasi	100%	0	0	0	100%	Terkait	Rp 600,700,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait

					Melakukan monitoring dan evaluasi data warga miskin	Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring evaluasi data warga miskin	0	5	0	0	5	Terkait	Rp 32,175,000	Bappedalitbang	
Untuk usulan bantuan sudah harus diinput H-1, sehingga ada bantuan yang belum bisa diakomodir.	Masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	100%	100%	Terpenuhi ya tempat tinggal yang layak sesuai standar keamanan, kesehatan dan sosial	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan RS-Rutilahu	0	46	0	0	46	Terkait	Rp 1,150,000,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan Rasko dari kelurahan	Masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BPNT, PKH dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH sosial bersyarat	100%	100%	Terpenuhi ya kebutuhan pangan warga kurang mampu	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT sosial bersyarat	15899	29776	0	0	45675	Terkait	Rp 4,370,880,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
							Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH sosial bersyarat	15899	15602	16000	16000	63501	Terkait		Dinas Sosial	SKPD Terkait

Kurangnya jejaring pemasaran hasil usaha	Masyarakat miskin yang mempunyai embrio usaha dan termasuk dalam data DTKS.	Persentase wira usaha binaan dinas sosial yang mandiri	100%	100%	Terasahnya keterampilan berusaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan keluarga	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan pembinaan	0	0	0	30	30	Terkait	Rp 500,000,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan Permakanan dari LKSA	Anak Terlantar yang tidak menerima permakanan	Persentase LKSA yang mendapat bantuan permakanan	100%	100%	Tersedianya permakanan Anak Terlantar	anak	Jumlah LKSA yang mendapatkan permakanan	31	31	31	31	124	Terkait	Rp 660,511,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya usulan permintaan sandang untuk anak terlantar Binaan LKSA yang berada di luar panti	Anak Terlantar yang tidak mendapatkan sandang yang layak	Persentase AT yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak	100%	100%	Tersedianya Sandang untuk Anak Terlantar	KPM	Jumlah KPM yang berada di luar Panti yang mendapatkan permakanan	0	0	105	0	105	Terkait	Rp 51,429,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya ODGJ Terlantar yang memerlukan permakanan secara layak	ODGJ Terlantar yang mendapatkan permakanan	Persentase ODGJ yang mendapatkan permakanan secara layak	100%	100%	Tersedianya permakanan untuk ODGJ di Rumah Singgah	orang	Jumlah ODGJ yang terlantar yang berada di Rumah Singgah	60	60	60	60	240	Terkait	Rp 831,633,600	Dinas Sosial	SKPD Terkait

Banyaknya usulan permintaan permakan an untuk Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar	Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan	Persentase Lansia Terlantar, Disabilitas , Gepeng dan Anak TerlantarT erlantar yang mendapat kan permakan an secara layak	100%	100%	Tersedianya Permakanan Untuk Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar	orang	Jumlah Lansia Terlantar , Disabilita s, Gepeng dan Anak Terlantar yang mendapa tkan permaka nan	0	50	420	50	520	Terkait	Rp 165,312,000	Dinas Sosial	SKPD Terkait
Banyaknya warga miskin yang putus sekolah	Meningkatk an rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	9.98-9.99	9.98-9.99	Meningkatk an partisipasi peserta pendidikan kesetaraan	Perda	Perda Disabilita s Nomor 3 Tahun 2022	1	0	0	0	1	Terkait	Rp -	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan
Perencanaan dan penganggara n pengentasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor	Meningkatn ya alokasi penganggara n untuk pengentaa n kemiskinan	Mandatory anggaran terkait pengentas an kemiskina n	n/a	2.58%	Membuat kebijakan terkait percepatan penanggula nган kemiskinan	Kebijak an	Perwali Kota Banjarm asin penangg ulangan kemiskin an terpadu	1	0	0	0	1	Terkait	Rp 248,691,900	Bappe dalitb ang	SKPD Terkait

dan instansi					Menyusun rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan	Rencana aksi	Tersusunnya rencana aksi tahunan terkait penanggulangan kemiskinan	1	0	0	0	1	Terkait			
					Membentuk tim penanggulangan kemiskinan	SK	SK Tim Penanggulangan Kemiskinan	1	0	0	0	1	Tidak Terkait			
	Terwujudnya peta proses bisnis yang terpadu	Tersedia probis terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	Melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam peningkatan kompetensi teknis dan manajerial SDMA pengentasan kemiskinan	Orang	Jumlah SDM terkait pengentasan kemiskinan yang mengikuti Diklat Penyusunan Proses Bisnis Pengentasan Kemiskinan	0	0	0	2	2	Tidak Terkait	Rp 39,248,000	BKD Diklat	SKPD Terkait
Biaya Harian Transportasi	Mengurangi Biaya Harian Transportasi	Murahnya Biaya Transportasi			Memberikan Pelayanan Angkutan Trans Banjarmasin dan Angkutan Pelajar Gratis	Unit	Jumlah Armada	0	0	0	38	38	Terkait	Rp 6,915,072,500	TPID	Dinas Perhubungan

2. Peningkatan Investasi

Rendahnya kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengidentifikasi dan Memasarkan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta Pontensi Investasi Daerah yang diupdate dan tersedia di website DPMPTSP dan Pemerintah Daerah	Datab ase	1	Tersedianya peta potensi investasi yang faktual dan mudah diakses	Dokum en	Tersedia nya Peta Potensi Investasi dan Peluang Berusaha Kota Banjarm asin	0	0	0	1	1	Terkait	Rp 55,000,000	DPMP TSP	DPMPTSP, Diskominfo, Bappedalitba ng, DKP3, Disperdagin, Kecamatan/ Kelurahan
						SDM	Jumlah SDM Kompete n yang melaksa nakan pemetaa n peta potensi investasi daerah	0	0	0	7	7	Tidak Terkait		DPMP TSP	Tenaga Ahli (Perguruan Tinggi)
		Persentase investor yang berkomite n untuk melakukan investasi	6%	3	Pameran promosi potensi investasi, forum bisnis, FGD strategi promosi	Jumlah	Form profil Minat Penanam an Modal	1	1	1	0	3	Tidak Terkait	Rp 317,167,200	DPMP TSP	DPMPTSP
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkat kanya Realisasi investasi daerah	1.154 Trilyu n	1.154 Trilyu n	Penyusunan perda insentif penanaman modal	Jumlah perda	jumlah tersusun nya perda insentif penanam an modal	0	0	0	1	1	Terkait	Rp -	DPRD /Bagi an Huku m/SK PD teknis	DPRD/Bagia n Hukum

					Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal	Kegiatan	Pemantauan Penanaman Modal	0	0	2	1	3	Tidak Terkait	Rp 50,000,000	DPMP TSP	SKPD Teknis/ pemegang hak akses turunan
					Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal	Kegiatan	Pembinaan Penanaman Modal	0	4	7	2	13	Tidak Terkait	Rp 377,027,900	DPMP TSP	SKPD Teknis/ pemegang hak akses turunan
					Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal	Kegiatan	Pengawasan Penanaman Modal	10	10	10	10	40	Tidak Terkait	Rp 190,371,700	DPMP TSP	SKPD Teknis/ pemegang hak akses turunan
Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PTSP	100%	100%	Meningkatkan Kepatuhan Pemenuhan Kriteria Penilaian Kinerja Layanan Investasi (Pemenuhan Kriteria Berdasarkan Permen Investasi/Keputra BKPM No. 2 Tahun 2022	Persentase	Pemenuhan kriteria kinerja PTSP	0	0	0	100%	100%	Tidak Terkait	Rp 271,675,000	DPMP TSP	SETDA, DPMP TSP, BKD Diklat, SKPD TEKNIK TERKAIT PPB
		Hasil Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda	%	17,8	tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan K/L.	Persentase	Pemenuhan kriteria kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	0	17,8	0	0	0	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMP TSP, BKD Diklat, SKPD TEKNIK TERKAIT PPB

		Ketepatan waktu layanan	%	100%	Meningkatkan Hasil Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu layanan	0	0	0	100%	100%	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMP TSP, DISKOMINFO, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB, INSPEKTORAT
						SOP	revisi SOP Pelayanan perijinan	0	0	1	1	2	Tidak Terkait		DPMP TSP	SKPD Terkait
		Survei Persepsi Anti Korupsi	Skor	3.9	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Skor	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	0	3.9	0	0	3.9	Tidak Terkait		DPMP TSP	SETDA, DPMP TSP, DISKOMINFO, SKPD TEKNIS TERKAIT PPB, INSPEKTORAT
						Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	90.26	Laporan	Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat	0	1	0		1	2
Rendahnya Kepatuhan Pelaporan LKPM	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Laporan Kegiatan Kegiatan Penanaman	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LKPM	%	100%	Melaksanakan Pengawasan Kepada Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan	6	7	8	5	26	Tidak Terkait	Rp 464,339,280	DPMP TSP	DPMP TSP

	Modal			100%	Melakukan Pembinaan kepada Pelaku Usaha melalui kegiatan Bimbingan Teknis / Sosialisasi	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	0	5	5	0	10	Terkait		DPMP TSP	DPMPTSP dengan Pelaku Usaha
				100%	Meningkatkan Ketepatan Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan	evaluasi, verifikasi penyampaian LKPM dari Pelaku Usaha Kecil-Menengah	1	1	1	1	4	Tidak Terkait		DPMP TSP	DPMPTSP, Pelaku Usaha

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)

Belum adanya sistem informasi Stunting	Tersedianya sistem informasi Stunting	Jumlah sistem informasi Stunting	1	-	Koordinasi dengan tim penanganan Stunting	Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan tim penanganan Stunting terkait sistem informasi Stunting	0	0	4	0	4	Tidak Terkait	Rp -	Diskominfotik	Dinas Kesehatan, DPPKBPM
					Pembuatan proses bisnis sistem informasi Stunting	Dokumen	Jumlah dokumen proses bisnis sistem informasi	0	0	1	0	1	Tidak Terkait	Rp -		Dinas Kesehatan, DPPKBPM

						Stunting										
					Pembuatan sistem informasi Stunting	Aplikasi	Jumlah aplikasi sistem informasi Stunting	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	Rp -	Dinas Kesehatan, DPPKBPM	
					Sosialisasi mengenai sistem informasi Stunting	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi mengenai sistem informasi Stunting	0	0	0	0	0	Tidak Terkait	Rp 3,300,000	Dinas Kesehatan, DPPKBPM, Kecamatan dan Kelurahan	
Masih kurangnya pengelolaan data stunting	Meningkatnya pelatihan pengelolaan data penderita stunting	Cakupan ketersediaan data aplikasi stunting	75%	75%	Melaksanakan pelatihan pengelolaan data/ sistem informasi stunting	Kegiatan	Jumlah pelatihan pengelolaan data/ sistem informasi stunting	1	1	0	0	2	Tidak Terkait	Rp 277,458,000	DPPK BPM	SKPD Terkait
Keterbatasan SDM dan Sarana komputer dalam menjalankan Aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	Meningkatnya kualitas ketersediaan data Aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	Cakupan ketersediaan data aplikasi e-PPGBM dan e-Kohort	100%	80%	Mengadakan pelatihan dan Bimtek dalam menjalankan aplikasi	Kegiatan	Terlaksananya evaluasi dan monitoring terkait kevalidan data aplikasi e-PPGBM dan E-Kohort	1	1	1	1	4	Tidak Terkait	Rp 25,000,000	Dinas Kesehatan	SKPD Terkait

Masih terdapatnya lembaga PAUD HI yang belum bekerjasama dengan posyandu, salah satu syarat agar bisa dipilih atau diusulkan sebagai lembaga PAUD HI adalah dengan melakukan kerjasama dengan posyandu	Meningkatnya Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase PAUD yang mengembangkan menjadi PAUD HI	55%	55%	Mengadakan Sosialisasi tentang PAUD HI	Orang	Peserta perwakilan lembaga yang mengikuti sosialisasi	0	0	160	0	160	Tidak terkait	Rp 44,461,000	Dinas Pendidikan	SKPD Terkait
4. Penggunaan Produk Dalam Negeri																
SDM PBJ yang kurang Kompeten	Meningkatnya SDM PBJ yang berkompeten	Jumlah SDM PBJ yang meningkatkan kompetensinya	21	21	Melakukan Pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Orang	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih	0	4	10	7	21	Tidak terkait	Rp 133,000,000	UKPB J	Pegawai UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum matang	Meningkatnya Kematangan organisasi UKPBJ	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3 atau 9 variabel	Level 3 atau 9 variabel	Melakukan pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	0	0	0	9	9	Tidak terkait	Rp 9,970,000	UKPB J	UKPBJ

					sebagai syarat level 3												
Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa kurang optimal	Meningkatnya Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Skor penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	21	21	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	kali	Jumlah sosialisasi PBJ	1	1	1	0	3	Terkait	Rp 30,911,400	UKPB J	UKPBJ dan Pelaku Pengadaan	
Belum meratanya informasi mengenai e katalog dan P3DN ke IKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan skpd terkait P3DN, PDN ber TKDN dan PDN non TKDN, serta meningkatnya jumlah produk dalam negeri Industri Kecil yang bersertifikat TKDN	Jumlah peserta sosialisasi mengenai e-katalog dan P3DN	50	50	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai e-katalog dan P3DN	Orang	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan mengenai e katalog dan P3DN	0	0	25	25	50	Terkait	Rp 31,438,000	Disperdagin	Disperdagin	
Masih rendahnya pemahaman IKM terkait pemenuhan persyaratan dalam sertifikat TKDN untuk PDN industri	Meningkatnya pemenuhan persyaratan dalam sertifikasi TKDN	Jumlah peserta sosialisasi mengenai pemenuhan persyaratan dalam sertifikat TKDN untuk PDN	50	50	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai pemenuhan persyaratan dalam sertifikat	Orang	Jumlah peserta sosialisasi yang memenuhi persyaratan dalam sertifikat TKDN	0	0	25	25	50	Terkait	Rp 13,200,000	Disperdagin	Disperdagin	

		Industri			TKDN untuk PDN Industri											
Proses sertifikasi yang sulit	Tersedianya fasilitasi sertifikasi	Jumlah fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	50	50	Menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	Orang	Jumlah IKM yang menerima fasilitasi sertifikasi dan pendampingan perolehan sertifikat TKDN	0	0	25	25	50	terkait	Rp 44,638,000	Disperdagin	Disperdagin
Belum adanya mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	Tersedianya mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	Jumlah mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	1	1	Penyusunan mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	kegiatan	jumlah rapat koordinasi penyusunan mekanisme/perangkat/sistem/regulasi penghimpunan data jumlah UMK/IKM yang sudah menjadi penyedia pada e katalog	0	0	0	1	1	Tidak terkait	Rp 2,499,400	Disperdagin	Disperdagin dan seluruh OPD

ASN yang belum kompeten dalam proses pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang bersertifikat PBJ		30 org	Melakukan pelatihan kepada ASN dalam proses pengadaan barang dan jasa	orang	ASN yang dilatih PBJ level 1	0	0	30	0	30	Tidak terkait	Rp 180,000,000	BKD	BKD Diklat, UKPBJ
				10 org	ASN yang lulus sertifikasi PBJ	orang	jumlah ASN yang lulus sertifikasi PBJ level 1	0	0	10	0	10	Tidak terkait		BKD	BKD Diklat, UKPBJ

5. Pengendalian Inflasi

Belum optimalnya kualitas Data Harga Bahan Pokok (BAPOK) dan Barang Penting	Menjaga kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun	2 - 4 %	2 - 4 %	Melakukan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	3	3	3	3	12	Terkait	Rp 70,571,520	Disperdagin	Disperdagin
					Melaksanakan Pasar Murah dan Bazar	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah dan Bazar	14	21	14	10	59	Terkait	Rp 1,558,624,000	Disperdagin	Disperdagin
					Melakukan Kerjasama antar Daerah dengan Daerah Penghasil Komoditas	Dokumen	Jumlah Kerjasama Antar Daerah	1	0	1	0	2	Tidak terkait	Rp -	TPID	Disperdagin

					Bahan Pokok												
Belum tersedianya pergudangan untuk ketahanan pangan	Ketersediaan Bahan Pangan untuk penanggulangan inflasi	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun	2 - 4%	2 - 4%	Melakukan pemantauan harga bahan Pangan	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya	12	12	12	12	48	Terkait	Rp 50,000,000	DKP3	DKP3	
					Melaksanakan Gerakan Pangan Murah	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	0	0	10	15	25	Terkait	Rp 493,757,600	DKP3	DKP3	
					Melaksanakan Penyaluran bantuan Beras CPP	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras CPP	1	2	0	0	3	Terkait	Rp 29,584,600	DKP3	DKP3	
Kecenderungan masy. yang belum menerapkan diversifikasi bahan pangan	Pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	85.5	85.5	Bimbingan Teknis Diversifikasi / Penganekaragaman Olahan Pangan	Kegiatan	Jumlah peserta bimbingan teknis diversifikasi/penganekaragaman olahan pangan	0	0	1	0	1	Terkait	Rp 11,221,400	DKP3	DKP3	

